

UPAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Studi Kasus : PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT. MADUBARU di Kasihan, Bantul)

Oleh :

Widho Pratomo (NIM. 20110520062)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2015

Abstrak

Pada dekade terakhir ini dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks, menempatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai konten yang diharapkan mampu memberi terobosan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diyakini telah berkembang pesat masih banyak menyisakan masalah sosial yang cukup serius. Keterbatasan peranan negara dalam pemberantasan masalah sosial inilah yang menjadikan sektor privat (lewat kegiatan CSR) menjadi sangat penting untuk menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Disinilah peneliti ingin melihat bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan CSR yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Maka peneliti memilih PT. Madubaru yang memiliki program khusus CSR dengan istilah PKBL. Karena banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR hanya sebagai kewajiban formalitas saja

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility, CSR, Pemberdayaan Masyarakat.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tergolong baru dalam hal penerapan program CSR. Penerapan CSR di Indonesia dimulai pada sekitar awal tahun 2000 tertinggal jauh dengan negara tetangga Filipina yang sudah menerapkannya sejak tahun 1970. Pada awalnya program ini masih menjadi hal yang cukup rumit karena di Indonesia sendiri belum mempunyai dasar hukum untuk mengatur program ini, pemerintah juga terlihat seperti memaksakan jalannya program ini padahal program CSR adalah program sukarela dan merupakan tanggung jawab perusahaan.

bisnis untuk memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan yang berkelanjutan. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.¹

Corporate Social Responsibility (CSR), adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas

¹Rachman, Nurdizal M. 2011. *Pandual Lengkap Perencanaan CSR*. hlm 15.

Berkat munculnya program CSR kini dunia usaha tidak lagi memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*Single Bottom Line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *Triple Bottom Line*. Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Penjelasan prinsip 3P yaitu : a. *profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang; b. *people*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia; c. *planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.²

Di Indonesia terdapat program CSR yang terbilang khusus dengan istilah PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL diatur dalam Peraturan MENTERI BUMI No.4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai maksimal 2% dari laba bersih.³ Di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang lemah dari segi ekonomi, PKBL seharusnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi seperti hal yang disampaikan oleh Rizky Wisnoentoro (Director of Applied Research for Indonesia CSR and

Philanthropy Transdisciplinary Action Group (CPTAG)University Sains Malaysia) pada prakteknya PKBL lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit bagi pengusaha kecil.⁴

Pada dekade terakhir ini dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks, menempatkan CSR sebagai konten yang diharapkan mampu memberi terobosan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diyakini telah berkembang pesat masih banyak menyisakan masalah sosial yang cukup serius. Keterbatasan peranan negara dalam pemberantasan masalah sosial inilah yang menjadikan sektor privat (lewat kegiatan CSR) menjadi sangat penting untuk menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut.

PT. MADUBARU merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR melalui PKBL. perusahaan ini bergerak di bidang agrobisnis dengan produk gula pasir dan alkohol, PT Madubaru sendiri sejak tahun 2004 hingga saat ini kepemilikan sahamnya ada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta) sebanyak 65% dan sisanya sebanyak 35% ada di tangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Terdapatnya sebagian saham ditangan BUMN menjadi alasan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dengan istilah dan dalam bentuk PKBL sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.⁵ Maka dari itu pada penelitian ini memilih PT. MADUBARU sebagai

²Siregar. (2007) Jurnal. *Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, hlm. 1.

³Dwi, Kartini, Prof, Dr. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 9.

⁴Rizky Wisnoentoro. *Tanya jawab CSR republika online*.

⁵<http://asosiasigulaindonesia.org/our-members/pt-pg-madu-baru/>

subjek penelitian karena mempunyai latar belakang yang cukup unik, dilihat dari kepemilikan saham perusahaan ini yang lebih dari separuhnya ialah milik Sri Sultan yang juga seorang gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan semua paparan di atas, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses kegiatan CSR PKBLPT. MADUBARU dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal khususnya mitra binaan.

II. Kerangka Teori

1) *Corporate Social Responsibility* Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari *top management* perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik.⁶

Menurut World Bank (Fox, Ward dan Howard 2002: 1), CSR merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya

pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dukungan sektor swasta dalam hal ini perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, dimulai ketika tahun 2000, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UN Global Compact sebagai salah satu lembaga yang memakai konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini merupakan representasi kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terciptanya *Good Corporate Citizenship* (UN Global Compact: 10). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberantas kemiskinan, menyelesaikan masalah buta huruf, memperbaiki layanan kesehatan, mengurangi angka kematian bayi, memberantas AIDS, menciptakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, dan merangsang terciptanya kemitraan dalam proses pembangunan.⁷ 2) Pemberdayaan Masyarakat Istilah “Pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengetasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT).⁸ Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Ife yang

⁶Efendi, Arief, Muh. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 107.

⁷Ibid.

⁸Agus Purbathin Hadi. (tanpa tahun). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*.

dikutip oleh Agus Purbathin Hadi dalam konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan, menyatakan bahwa⁹ :

Pemberdayaan adalah proses membantu kelompok dan individu yang untuk bersaing secara lebih efektif dalam berbagai kepentingan, dengan membantu mereka untuk belajar me-lobi , menggunakan media, terlibat dalam aksi politik , memahami bagaimana sistem bekerja, dan sebagainya.

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu¹⁰:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang keberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu bertujuan untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis

⁹ Ibid

¹⁰ Theresia, aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. hlm. 119-121.

permasalahan yang ada¹¹, dan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati¹². Serta penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti guna untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan pemberdayaan pada CSR PKBLPT. MADUBARU.

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan skunder. Sumber primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber skunder tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Mitra Binaan PKBL PT. MADUBARU sebanyak 170 orang, peneliti mengambil 30 orang mitra binaan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan (pelatihan, pameran, studi banding) sebagai sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposeful sampling*. *Purposeful sampling* merupakan teknik dalam *non-probability sampling* yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya CSR dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan pelatihan, pameran dan studi banding, maka peneliti memilih mitra binaan yang benar-benar aktif dalam kegiatan pemberdayaan CSR PKBL PT. MADUBARU sebagai sampel yang dirasa dapat mendukung penelitian.

IV. Pembahasan

Pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. MADUBARU telah berjalan sejak tahun 1991 dan dulu dikenal dengan nama PEGELKOP (Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi). Dalam perkembangannya program ini mengalami beberapa kali perubahan nama dan saat ini dikenal dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL di PT. MADUBARU ialah hasil dari permintaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia selaku perusahaan milik negara yang menanamkan modal sebesar 35%. Dalam pelaksanaannya, PKBL memiliki landasan hukum yaitu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

¹¹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 2.

¹² Lexy Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hlm. 5.

¹³ *Jurnal bisnis manajemen dan ekonomi*, volume 10. No 3 agustus 2011.

¹⁴ Ibid

terbatas dan adanya PP No. 47 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta komitmen manajemen untuk selalu berbagi dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Ketentuan umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007. Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN. Sedangkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih 200 juta atau hasil penjualan 1 M pertahun. Mitra Binaan merupakan usaha Kecil yang mendapat pinjaman dari Program Kemitraan.

Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam lingkup program kemitraan, program kemitraan ini adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dan jenis usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi baik di bidang industri, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang jasa dan lainnya dengan ketentuan dan kriteria yang diatur oleh BUMN. bentuk kegiatan dari program kemitraan yaitu: pinjaman jangka panjang,

pinjaman jangka pendek dan hibah/pemberdayaan masyarakat (pameran, studi banding, pelatihan/diklat mitra binaan) yang ditujukaan untuk mitra binaan dari PT. MADUBARU PG-PS Madukismo.

Tabel 2.

| No | Uraian | Jumlah Penyaluran Dana |
|--------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Program Bina Lingkungan | |
| | a. Bantuan Bencana Alam | (-) |
| | b. Bantuan Sarana Pendidikan | 21.359.000 |
| | c. Peningkatan Kesehatan | 4.500.000 |
| | d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum | 4.000.000 |
| | e. Sarana Ibadah | 2.000.000 |
| | f. Pelestarian Alam/Lingkungan | (-) |
| | g. Sarana Transportasi Buruh | (-) |
| | h. Bantuan Sosial | (-) |
| | 2 | Program Kemitraan |
| a. Dana Pinjaman | | 0 |
| b. Pelatihan dan Studi Banding | | 28.320.000 |
| c. Pameran | | 15.322.550 |
| Jumlah | | 1.564.501.55 |
| | | 0 |

Realisasi Anggaran PKBL PT. MADUBARU 2014

Sumber : dokumentasi PT. MADUBARU

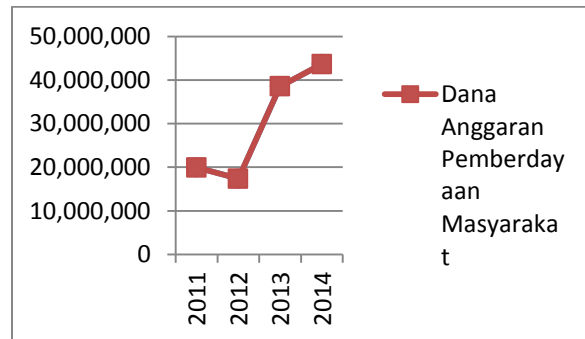
Peraturan MENTERI BUMI No.4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai maksimal 2% dari laba bersih. Laba bersih PT. MADUBARU pada tahun 2014 sebesar 6,3 milyar, jika melihat tabel anggaran di atas, maka total jumlah anggaran PKBL akan jauh di atas standar peraturan pemerintah yang maksimal hanya 2% dari laba bersih, hal tersebut dikarenakan akumulasi

dari dana pinjaman yang memang sudah berjalan sejak lama.

Hanya terdapat dua bentuk program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PT. MADUBARU yaitu manajerial dan pemasaran dimana keduanya tergolong dalam program kemitraan. Kegiatan manajerial berupa pelatihan/diklat dan studi banding sedangkan kegiatan pemasaran berupa pameran dan promosi produk unggulan dari mitra binaan. Dalam tabel anggaran dan di halaman sebelumnya bisa kita lihat bahwa dana kegiatan pemberdayaan hanya sekitar 2,8% dari total anggaran seluruh kegiatan PKBL.

Grafik 1.

Besaran dana pemberdayaan masyarakat tahun 2011-2014



Sumber :Dokumentasi PT. MADUBARU

Pada grafik di atas bisa diketahui bahwa pada empat tahun terakhir dana yang di anggarkan oleh PKBL PT. MADUBARU untuk CSR kegiatan pemberdayaan mengalami kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2013 walau sempat sedikit menurun pada tahun 2012 tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi dengan jumlah yang terhitung besar. Dengan hal tersebut sudah membuktikan bahwa perhatian

PKBL PT. MADUBARU tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat semakin bertambah, walaupun memang sebagian besar dana CSR hanya berfokus pada peminjaman modal usaha.

Dari semua paparan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Madubaru telah melaksanakan serangkaian program CSR melalui unit PKBL berupa bantuan sosial maupun kegiatan pelestarian lingkungan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.

V. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1) Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 PT. MADUBARU telah melakukan

serangkaian kegiatan CSR yang bersifat sosial maupun pelestarian lingkungan melalui PKBL.

2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKBL PT. MADUBARU masih sangat minim sekali dilihat dari kegiatannya yang sedikit dan terbatas. Program PKBL PT. MADUBARU masih berfokus pada peminjaman modal usaha, hal tersebut dapat dilihat dari timpangnya dana yang dianggarkan.

3) Pada tahap-tahap pemberdayaan masih banyak yang belum atau kurang dilakukan secara maksimal oleh PKBL PT. MADUBARU, contohnya seperti usulan warga yang belum bisa dikordinir, sosialisasi yang kurang maksimal, dan tidak adanya wadah untuk melatih warga dalam memformulasikan keinginannya dalam bentuk tulisan.

Daftar Pustaka

Buku

Adi, Isbandi Rukminto. 2004. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: FISIF UI Press.

Edi Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Refika Adtama.

Badan Pusat Statistik DIY. 2000. *Indikator Kesejahteraan Rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta* : Badan Pusat Statistik DIY.

Efendi, Arief, Muh. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghony, M Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Haris herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika
Irwanto 2006. *Focus Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Matthew B. Milles, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Joko P. Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

M. Rahman, Nurdizal, dkk. 2009. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta Bandung

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode penelitian Survey*., Jakarta: LP3EWS

Theresia, Aprilia. dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Lainnya

Dwi, Kartini, Prof, Dr. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 9.

Siregar. 2007. Jurnal. *Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, 1.

Jurnal bisnis manajemen dan ekonomi, volume 10. No 3 agustus 2011.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi

UU no. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial PDF.

Website

Agus Purbathin Hadi. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, PDF.

http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=3397813604668754922&sci_psc, diakses pada 4mei 2015, pukul 15.00 wib.

<http://asosiasigulaindonesia.org/our-members/pt-pg-madu-baru/>, diakses pada mei 2015, pukul 14.20 wib.

<http://www.republika.co.id/berita/csr/tanya-jawab-csr/12/01/09/lxiwvu-apa-perbedaan-csr-dengan-pkbl> diakses pada 01 juli 2015, pukul 14.20 wib.

http://benny-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-67789-UmumKesejahteraan%20Sosial.html

[diakses pada 10 November 2014 jam 15.30 wib.](#) diakses pada 4 mei 2015, pukul 14.20 wib.